

**ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM
PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN**

Putri Hariyani

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
Putrihariyani339@gmail.com

Vinni Dini Pratiwi

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id

Ayu Nova Syahfitri

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
Ayunovasyahfitri144@gmail.com

Bella Syafira

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
bssyafira409@gmail.com

Bunga Chalista

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
bungachalista@gmail.com

Article History

Submitted: Juni 2025

Revised: Juni 2025

Accepted: Juni 2025

Abstract:

This study aims to discuss financial administration in education. The method used in this study is the literature study method. Financial administration in education is a series of planning, implementation, supervision, and financial reporting processes that aim to support the effectiveness and efficiency of educational fund management. In practice, financial administration is an important element in supporting teaching and learning activities, development of facilities and infrastructure, and the welfare of educators. The main objectives of educational administration include reducing budget waste, increasing orderly and accountable financial management, as well as asset maintenance and compliance with regulations. Financial administration includes budgeting, recording, accountability, and audit functions so that the use of funds can be accounted for transparently and accountably. In Indonesia, the main obstacles in the implementation of educational financial administration are limited funds, uneven distribution, and low managerial capabilities of financial managers. Therefore, the principles of transparency, efficiency, effectiveness, and accountability are very necessary. The process of educational financial administration includes planning, implementation (use and recording of funds), and reporting and accountability. In order for financial administration in education to run optimally, educational institutions should strengthen the application of the principles of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness in every financial management process.

Keywords: Administration, Finance, Education Fund

Abstrak:

(Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai administrasi keuangan dalam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Administrasi keuangan dalam pendidikan adalah serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Dalam praktiknya, administrasi keuangan menjadi elemen penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, pengembangan sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Tujuan utama administrasi pendidikan mencakup pengurangan pemborosan anggaran, peningkatan pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemeliharaan aset dan kepatuhan terhadap regulasi. Administrasi keuangan mencakup fungsi penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban, dan audit agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Di Indonesia, kendala utama dalam pelaksanaan administrasi keuangan pendidikan adalah keterbatasan dana, distribusi yang tidak merata, serta rendahnya kemampuan manajerial pengelola keuangan. Oleh karena itu, prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sangat diperlukan. Proses administrasi keuangan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan (penggunaan dan pencatatan dana), serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar administrasi keuangan dalam pendidikan berjalan optimal, lembaga pendidikan sebaiknya memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan.).

Kata Kunci:

Administrasi, Keuangan, Dana Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan oleh karena itu setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan. Menurut UU RI No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Burhan dkk, 2023: 1).

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu unggul, memiliki banyak faktor pendukung yang sistematis dan saling berkaitan. Banyak pakar pendidikan yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor tersebut, diantaranya adalah Human Resource atau bahasa yang populer di telinga kita adalah SDM (sumber daya manusia), kualitas pendidik dan tenaga pendidik, sistem rekrutmen peserta didik, metode, media, kurikulum serta ketersediaan sarana prasarana pendukung keberlangsungan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan sistem finansial pendidikan (Napitupulu, Azrun, & Siti, 2021: 13).

Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (*money*) untuk menggerakkan semua sumber daya (*resource*) yang dimilikinya. Rofiq menjelaskan bahwa uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini sering dinamakan juga dengan administrasi keuangan dalam pendidikan (Rusdiana & Wardija, 2021: 3).

Administrasi Keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan untuk mencapai tujuan tiap Perusahaan atau organisasi. Dalam suatu pendidikan akan selalu ada kegiatan keuangan dan pengeluaran baik yang di sadari maupun tidak disadari, baik langsung maupun tidak langsung. Semua kegiatan pendidikan tidak luput dari kegiatan keuangan sehingga perlu adanya pengelolaan yang sangat baik agar tidak terjadi kesalahan sedikitpun. Komponen keuangan harus di kelola dengan baik karena banyak masalah yang terjadi dalam kegiatan pendidikan oleh karena itu keuangan dalam pendidikan harus di kelola dengan baik supaya tercapainya suatu pendidikan yang baik dan optimal (Yanti et al, 2024: 100).

Ketersediaan dana yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik, maka tidak mustahil pemborosan, ketidak sesuaian belanja dengan rencana atau bahkan penyelewengan dana bisa saja terjadi, untuk itu perencanaan yang baik, kesesuaian belanja sekolah dengan rencana, pengawasan dan pertanggung jawaban perlu di manajemen dengan baik (Fitriani, 2023: 1035).

Administrasi keuangan pendidikan adalah elemen krusial dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Di Indonesia, administrasi keuangan lembaga pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga pelaporan penggunaan dana. Setiap sekolah atau institusi pendidikan harus memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Dana pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, harus diarahkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pengembangan sarana dan prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak lembaga pendidikan yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan dengan baik, yang akhirnya berdampak pada rendahnya mutu pendidikan.

Salah satu kendala utama dalam administrasi keuangan pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya alokasi dana yang diterima oleh sekolah, khususnya yang berada di daerah terpencil. Meskipun pemerintah telah meningkatkan anggaran pendidikan melalui berbagai program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), distribusi dana tersebut sering kali tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik

setiap sekolah. Sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan dana ini harus berhadapan dengan berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional harian, seperti perawatan fasilitas, pembelian buku, dan pengadaan peralatan belajar. Kondisi ini semakin sulit ketika administrator keuangan sekolah tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola anggaran secara efektif, sehingga inefisiensi dalam penggunaan dana sering terjadi (Nulaningsih & Nuraini, 2024).

Administrasi keuangan harus ditangani secara serius, sistematis, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena manajemen keuangan yang efisien akan memastikan adanya keuntungan bagi lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bagus, tentunya memiliki pengelolaan keuangan yang bagus pula guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama.

Penelitian Adillah menunjukkan bahwa; untuk mendapatkan dana guna memenuhi berbagai kebutuhannya, lembaga pendidikan harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dalam pengelolaannya, lembaga pendidikan seperti sekolah perlu melibatkan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal untuk mengawal sistem keuangan yang ada. Melalui pelibatan tersebut, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sistem keuangan sekolah, mulai dari partisipasi, pemenuhan kebutuhan sekolah, sampai pada pengawasannya. Selanjutnya dalam penelitiannya menegaskan bahwa; manajemen keuangan harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan dan pemanfaatan, sampai dengan pengawasan (Fitriani, 2023).

Administrasi keuangan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program dan kegiatan suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan yang tepat mencakup penganggaran, pencatatan, pelaporan, hingga audit, yang memastikan bahwa dana yang diterima oleh sekolah digunakan secara efektif dan transparan. Administrasi keuangan yang baik berfungsi untuk mendukung keberlanjutan operasional lembaga pendidikan dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.

Administrasi keuangan yang efektif berkontribusi langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan seperti sekolah kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan bukan hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan upaya dalam memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal (Fransiska et al, 2025).

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai administrasi keuangan dalam pendidikan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai administrasi keuangan dalam pendidikan dan memberikan manfaat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Menurut Nazir (dalam Ibrahim, 2023 197), studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi/telaah terhadap berbagai literatur, seperti buku, dokumenter, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

Sumber-sumber yang diteliti pun tidak boleh sembarangan. Sebab tidak semua hasil penelitian bisa dijadikan acuan. Beberapa yang umum dan layak digunakan adalah buku-buku karya pengarang terpercaya (lebih disarankan karya akademisi), jurnal-jurnal ilmiah

Putri Hariyani; Vinni Dini Pratini; Ayu Nova Syahfitri; Bella Syafira; Bunga Chalistha

terakreditasi, dan hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai bentuk misalnya skripsi, tesis, disertasi, laporan praktikum, dan sebagainya.

Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi literatur. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi literatur, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya (Purwanto, 2022: 81).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu mengenai administrasi keuangan dalam pendidikan. Sumber-sumber ini dipilih sesuai dengan pembahasan yang sedang peneliti bahas ini.

Hasil dan Pembahasan

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas kata *ad* dan *ministrare*. Kata “*ad*” mempunyai arti yang sama dengan kata “*to*” dalam bahasa Inggris, yang berarti "ke" atau "kepada". Dan *ministrare* sama artinya dengan kata *to serve* atau *to conduct* yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris *to administer* berarti pula mengatur, memelihara, (*to look after*) dan "mengarahkan". Oleh karena itu, suatu kegiatan atau usaha membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur segala kegiatan dalam mencapai suatu tujuan dapat diartikan sebagai administrasi (Napitupulu et al, 2022: 216).

Administrasi diartikan sebagai kegiatan menyusun informasi secara sistematis dan mencatat secara tertulis segala kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh gambaran umum tentang informasi itu secara utuh dan hubungannya satu sama lain, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang informasi itu secara utuh dan menyeluruh (Rahmawati, Erny & Nunuk, 2022: 39).

Administrasi keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Secara teknis, administrasi keuangan berkaitan dengan persoalan budgeting atau penganggaran. Dalam hal ini keberadaan anggaran merupakan instrumen penting dalam hal perencanaan dan pengendalian serta sebagai alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga atau organisasi pada posisi yang kuat atau lemah (Frasetia et al, 2023: 3757).

Menurut Depdiknas bahwa administrasi keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan cara yang efektif. Ini berarti bahwa dengan anggaran yang tersedia, tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat.

Pengolahan data administrasi keuangan dalam sebuah institusi pendidikan merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan secara periodik ataupun setiap saat, data-data keuangan tersebut selalu berubah setiap bulan atau setiap tahun, pengeluaran dan pemasukan. Sedangkan informasi dituntut untuk selalu aktual, sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi yang bisa mengolah data-data secara cepat dan efektif (Hulopi et al, 2024: 227).

Menurut Mamesah (dalam Fransiska et al, 2025) administrasi keuangan adalah: “Rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat,

berdaya guna dan berhasil guna. (mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan-pembayaan).

Menurut Nawawi, pengertian administrasi keuangan terbagi menjadi 2, yaitu: 1) Arti sempit. Yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. 2) Arti luas. Yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan (Nengsi et al, 2025: 146).

Menurut Rifa'I, Rusydi, & Muhammad (2023: 20), Administrasi keuangan meliputi usaha atau kegiatan mengatur dan memproses urusan keuangan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan madrasah, serta pengelolaan keuangan ini bersifat (formal karena sudah diatur dengan perundang-undangan yang berlaku).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa administrasi keuangan pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari sumber pendapatan dan pengeluaran dengan tujuan mengelola pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Memperoleh dan mengidentifikasi sumber pendanaan, penggunaan dana, pelaporan, audit, dan akuntabilitas adalah beberapa tugas pengelolaan keuangan (Yanti et al, 2024).

Dalam pengelolaan administrasi keuangan pendidikan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur oleh Undang-undang No 20 Tahun 2003, khususnya yang tercantum dalam Pasal 48. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain itu, penekanan pada prinsip efektivitas juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, sekolah dapat mencapai pengelolaan dana yang lebih baik, memberikan manfaat yang merata, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Salsabila & Bambang, 2024: 1051).

Menurut Akhmad, Chindy, & Subandi (2024: 7), tujuan administrasi keuangan dalam pendidikan, khususnya di sekolah adalah mengurangi jumlah uang yang digunakan sekolah dengan cara yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah dan mengurangi penyalahgunaan anggaran. Prinsip keuangan sekolah adalah transparan, yang berarti bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus transparan. Ini berarti bahwa semua pihak yang berkepentingan harus memiliki informasi yang jelas tentang sumber data yang digunakan, jumlah dana yang digunakan, serta tanggung jawab dan rincian penggunaan dana tersebut.

Tujuan administrasi keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib manajemen keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya (Switri, 2020: 143).

Menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan FIP UPI menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan administrasi keuangan pendidikan, di antaranya: 1) Menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, 2) Memelihara barang-barang (asset) sekolah dan 3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan (Samudi & Siti, 2022: 144).

Fungsi administrasi keuangan pendidikan. melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan yang ada dalam institusi pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga

pendidikan lainnya. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional institusi pendidikan dan penggunaan yang efektif dan efisien dari dana yang tersedia (Aziz dkk, 2023: 128).

Secara fungsi, administrasi keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas yakni, menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni (Hadi, 2023: 58): (1) Kepala sekolah; Data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengvaluasi kemajuan serta melakukan upaya korektif yang diperlukan. (2) Guru dan karyawan sekolah; data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pensiun dan peluang kerja. (3) Wali murid; bermanfaat bagi wali murid untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah perjanjian jangka panjang sekolah dan tingkat ketergantungan sekolah. (4) Pemerintah; untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya. Dan (5) Masyarakat; membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah.

Terdapat proses pada administrasi keuangan pendidikan, seperti disekolah, yaitu (Febriani, Friska & Muhammad, 2024: 756):

1. Perencanaan RPS

Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan untuk menentukan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pemilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. RPS adalah gambaran tentang kegiatan sekolah dimasa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

Rancangan Pengembangan sekolah (RPS) merupakan salah satu wujud dari manajemen sekolah yang sangat penting yang harus di miliki sekolah sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. RPS disusun untuk:

- a. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
- b. Mendukung kordinasi antar pelaku sekolah,
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota dan antar waktu

2. Pelaksanaan (Penggunaan, Pencatatan Dana)

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator dan perbendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Ordonator adalah pejabat yang berwenang yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya, yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban.

Penggunaan uang mestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku.

3. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Penerimaan dan pengeluaran sekolah harus di laporkan dan dipertanggung jawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran rutin dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang telah disepakati yaitu sebagai berikut:

- a. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, bendaharawan mengirim Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada walikota atau bupati melalui bagian Keuangan Sekretariat Daerah
- b. Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah maka tanggal 11 dikirimkan Surat Peringatan I.
- c. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ belum dikirim juga kebagian Keuangan Sekretariat Daerah, maka dibuatkan Surat Peringatan II.
- d. Kelengkapan lampiran SPJ
- e. Bukti Pendukung atau Lampiran SPJ

Menurut Djoened Rastavara dalam pelaksanaan administrasi keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggung jawaban. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran. Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana, hingga pemanfaatan dana (Fitrianti, 2023: 1042).

Dalam mengelola keuangan pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang agar berjalan dengan baik. Diantaranya, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Transparansi dalam administrasi keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggung jawaban keuangan pendidikan.

Informasi keuangan pendidikan disebuah lembaga pendidikan dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU) maupun melalui media *online website* lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga semua yang berkepentingan mudah mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Administrasi keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan dapat dikatakan efisien jika mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya tertentu dalam memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas (Fitrianti, 2023: 1047).

Penutup

Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pencatatan, pengelolaan, pengawasan, serta pelaporan terhadap keuangan lembaga pendidikan secara sistematis, sah, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama administrasi pendidikan mencakup pengurangan pemborosan anggaran, peningkatan pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemeliharaan aset dan kepatuhan terhadap regulasi. Administrasi keuangan di sekolah melibatkan tiga proses utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban.

Secara fungsional, administrasi keuangan pendidikan meliputi pengelolaan sumber daya keuangan agar keberlanjutan institusi pendidikan tetap terjamin. Fungsi lainnya adalah menyediakan data kuantitatif yang berguna bagi berbagai pihak: kepala sekolah untuk perencanaan dan evaluasi, guru dan staf untuk kepastian imbal jasa, wali murid untuk memantau kondisi keuangan sekolah, pemerintah untuk penyusunan anggaran, serta masyarakat sebagai bentuk transparansi publik. Dengan demikian, administrasi keuangan berperan sebagai landasan pengambilan keputusan dan penentu arah keberlangsungan lembaga pendidikan.

Agar administrasi keuangan dalam pendidikan berjalan optimal, lembaga pendidikan sebaiknya memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga administrasi keuangan melalui pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan dana pendidikan lebih tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Akhmad, A., Chindy A. A., & Subandi. Supervisi Pendidikan Dalam Manajemen Administrasi Keuangan Sekolah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 6, (2024), 1-10.
- Aziz, A., dkk. *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, dan Implementasi Praktis*. Malang: Pustaka Peradaban, 2023.
- Burhan, K., dkk. *Konsep dan Implementasi Pendidikan*. Makassar: Cendekia Publisher, 2023.
- Febriani, A., Friska W., & Muhammad F. D. Pembiayaan Dalam Administrasi Pendidikan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 5, (2024), 753-758.
- Fransiska, R. E., et. al. Urgensi Administrasi Keuangan Sekolah Era Society 5.0. *Jurnal Program Studi Administrasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (2025), 35-49.
- Frasetia, N., et. al. Administrasi Keuangan Madrasah Ibtidaiyah Al-Birra Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, (2023), 3756-3760.
- Hadi, M. *Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. Lampung: Laduny Alifatama., 2023.
- Hulopi, H., et. al. Administrasi Keuangan Sekolah Dan Sarana Prasarana. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 9, No. 2 (2024), 224-233.
- Ibrahim, A. *metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Napitupulu, D. S., Azrun Z., & Siti A. Administrasi Keuangan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal MUBADDIR*, Vol. 1, No. 1, (2021), 12-21.

- Napitupulu, M. B., *et. al.* Pentingnya Administrasi Dalam Pendidikan. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, (2022), 214-222.
- Nengsi, Y. S., *et. al.* Pengelolaan Keuangan Sekolah: Sumber Pembiayaan dan Pertanggungjawaban dalam Satuan Pendidikan. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 2, No.1, (2025), 144-162.
- Purwanto, A. *konsep dan Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Rahmawati, Y. H., Erny R., & Nunuk H. Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pada SMP Lab Unesa). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, Vol. 9, No. 1, (2022), 38-49.
- Rifa'I, M., Rusydi A., & Muhammad R. S. *Administrasi Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Sains*. Medan: UMSU Press, 2023.
- Rusdiana, A., & Wardija. *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/ Madrasah*. Jakarta: ARSAD Press, 2021.
- Salsabila, S. S., & Bambang H. Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekolah Tinjauan Terhadap Kemampuan SDM Dengan Rangkap Jabatan Pada Mi Cigintung Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 2, (2024), 1049-1058.
- Samudi & Siti R. *Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Switri, E. *Administrasi Pendidikan*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Wulaningsih, R., & Nuraini A. Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, Vol. 4, No. 4, (2024), 1723-1732.
- Yanti, W. R., *et. al.* Proses Administrasi Keuangan Sekolah di Era Society 5.0. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, (2024), 99-115.